

Lampiran 1

Komitmen Internasional

DPR Amerika, Mr Faleomavaega dalam US House of Representatives menyampaikan hal-hal yang mendukung Papua Barat dalam FRAA, In Support Of West Papua New Guinea's Quest For Freedom, hasilnya yaitu :

H.R. 2601. Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 2006 and 2007 (as at July 13, 2005), pages 326:11 - 332:23]

SEC. 1015.* DEVELOPMENTS IN AND POLICY TOWARD INDONESIA.

(b) Findings Relating to Papua- Congress finds the following:

- (1) Papua, a resource-rich province whose indigenous inhabitants are predominantly Melanesian, was formerly a colony of the Netherlands.
- (2) While Indonesia has claimed Papua as part of its territory since its independence in the late 1940s, Papua remained under Dutch administrative control until 1962.
- (3) On August 15, 1962, Indonesia and the Netherlands signed an agreement at the United Nations in New York (commonly referred to as the 'New York Agreement') which transferred administration of Papua first to a United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), and then to Indonesia in 1963, pending an 'act of free choice . . . to permit the inhabitants to decide whether they wish to remain with Indonesia'.
- (4) In the New York Agreement, Indonesia formally recognized 'the eligibility of all adults [in Papua] . . . to participate in [an] act of self-determination to be carried out in accordance with international practice', and pledged 'to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice . . . before the end of 1969'.
- (5) In July and August 1969, Indonesia conducted an 'Act of Free Choice', in which 1,025 selected Papuan elders voted unanimously to join Indonesia, in circumstances that were subject to both overt and covert forms of manipulation.
- (6) In the intervening years, indigenous Papuans have suffered extensive human rights abuses, natural resource exploitation, environmental degradation, and commercial dominance by immigrant communities, and some individuals and groups estimate that more than 100,000 Papuans have been killed during Indonesian rule, primarily during the Sukarno and Suharto administrations.
- (7) While the United States supports the territorial integrity of Indonesia, Indonesia's historical reliance on force for the maintenance of control has been

counterproductive, and long-standing abuses by security forces have galvanized independence sentiments among many Papuans.

(8) While the Indonesian parliament passed a Special Autonomy Law for Papua in October 2001 that was intended to allocate greater revenue and decision making authority to the Papuan provincial government, the promise of special autonomy has not been effectively realized and has been undermined in its implementation, such as by conflicting legal directives further subdividing the province in apparent contravention of the law and without the consent of appropriate provincial authorities.

(9) Rather than demilitarizing its approach, Indonesia has reportedly sent thousands of additional troops to Papua, and military operations in the central highlands since the fall of 2004 have displaced thousands of civilians into very vulnerable circumstances, contributing further to mistrust of the central government by many indigenous Papuans.

(10) According to the 2004 Annual Country Report on Human Rights Practices of the Department of State, in Indonesia 'security force members murdered, tortured, raped, beat, and arbitrarily detained civilians and members of separatist movements' and 'police frequently and arbitrarily detained persons without warrants, charges, or court proceedings' in Papua.

Terjemahannya :

(b) Temuan berkaitan dengan Papua - Kongres menemukan hal-hal berikut :

(1) Papua , sebuah provinsi yang kaya sumber daya yang penduduknya sebagian besar adalah penduduk asli Melanesia , sebelumnya merupakan koloni Belanda .

(2) Meskipun Indonesia telah mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayahnya sejak kemerdekaannya di akhir 1940-an , Papua tetap berada di bawah kontrol administratif Belanda sampai tahun 1962 .

(3) Pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani kesepakatan di PBB di New York (sering disebut sebagai ' New York Agreement ') yang ditransfer administrasi Papua pertama ke United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) , dan kemudian ke Indonesia pada tahun 1963 , sambil menunggu ' tindakan pilihan bebas untuk mengizinkan penduduk dalam memutuskan apakah mereka ingin tetap bersama Indonesia ' .

(4) Dalam Perjanjian New York , Indonesia secara resmi mengakui ' kelayakan dari semua orang dewasa [di Papua] untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktek internasional ' , dan berjanji ' untuk memberikan orang-orang dari wilayah kesempatan untuk melaksanakan kebebasan memilih, sebelum akhir tahun 1969 ' .

(5) Pada bulan Juli dan Agustus 1969, Indonesia melakukan ' Act of Free Choice ' , di mana 1.025 tetua Papua yang dipilih dengan suara bulat untuk bergabung

dengan Indonesia , dalam kenyataannya terdapat 2 persoalan dilakukan secara jelas dan adanya bentuk rahasia manipulasi.

(6) Bertahun-tahun , penduduk asli Papua telah menderita pelanggaran hak asasi manusia , eksploitasi sumber daya alam , degradasi lingkungan , dan dominasi komersial komunitas imigran , dan beberapa individu dan kelompok memperkirakan bahwa lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas selama pemerintahan Indonesia , terutama selama pemerintahan Soekarno dan Soeharto .

(7) Sementara Amerika Serikat mendukung integritas wilayah Indonesia , ketergantungan sejarah Indonesia pada kekuatan untuk pemeliharaan kontrol telah kontraproduktif , dan pelanggaran oleh pasukan keamanan telah galvanis sentimen kemerdekaan di antara banyak orang Papua .

(8) Sementara parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua pada bulan Oktober 2001 yang dimaksudkan untuk mengalokasikan pendapatan dan pengambilan keputusan kewenangan kepada pemerintah provinsi Papua yang lebih besar , janji otonomi khusus belum efektif menyadari dan telah dirusak dalam Surat implementasi, misalnya dengan saling bertentangan arahan hukum lebih lanjut membagi provinsi bertentangan nyata dari hukum dan tanpa persetujuan dari pemerintah provinsi sesuai.

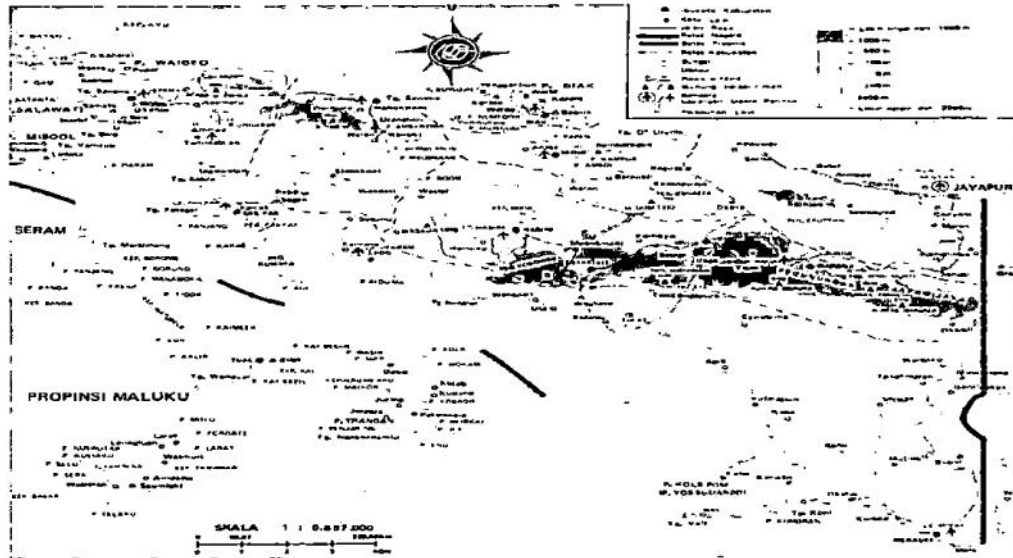
(9) Dari pendekatan demilitarizing, Indonesia dilaporkan telah mengirimkan ribuan pasukan tambahan ke Papua , dan operasi militer di dataran tinggi tengah sejak musim gugur 2004 telah mengungsi ribuan warga sipil dalam keadaan yang sangat rentan , memberikan kontribusi lebih lanjut untuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat oleh banyak penduduk asli Papua .

(10) Menurut Laporan Tahunan 2004 Negara pada Praktek Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri , di Indonesia ` anggota pasukan keamanan membunuh, menyiksa , memperkosa , memukuli , dan warga sipil dan anggota gerakan separatis ditahan sewenang-wenang ' dan ` polisi sering dan sewenang-wenang menahan orang-orang tanpa surat perintah , tuduhan , atau proses pengadilan ' di Papua .

Lampiran II

Peta dan Gambar

Gambar 1.0 Peta Papua



Gambar 1.1 Pemimpin OPM Benny Wenda dan Walikota Oxford Mohammad Niaz Abbasi



Lampiran III

Gambar 1.2 Benny Wenda (tengah) didampingi pengacara Ham Jennifer Robinson dari Australia (Foto: zonadamai@worldpress.com)



Gambar 1.3 Kantor Free West Papua di Oxford Inggris (kompas.com)

